

Studi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat

Ali Zainal Abidin^{1,*}, Muhammad Arif¹, Sittah Alifia Abroroh¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

^{*}Korespondensi (e-mail: aza200@ums.ac.id)

Abstract

The research was carried out to investigate women's contributions in the political aspect, especially in the legislative institutions in the province of West Java, Indonesia. This study uses a quantitative approach, with data processing based on panel data analysis. The Gender Development Index (IPG) was chosen as the dependent variable. In contrast, the independent variables used the Total Female Population (JPP), Average Years of Schooling (RLS), Number of Female Legislative Members (JALP), and the Gender Empowerment Index (IBG). The study used the province of West Java as the location, with secondary data from 2017 to 2020. The results showed that the average length of schooling (RLS) was the only variable positively influencing the Gender Development Index (GPA). This shows that the contribution of women on the political stage will increase along with the number of women with higher education. Other variables do not affect the index.

Keywords: Women's contribution, Gender, Legislative institutions, Politics, Gender development index

Abstrak

Penelitian dilaksanakan dalam rangka menyelidiki kontribusi-kontribusi kaum perempuan pada aspek politik, khususnya pada lembaga legislatif di provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan pengolahan data berbasis analisis panel data. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dipilih menjadi variabel dependen, sementara variabel independen menggunakan Jumlah Penduduk Perempuan (JPP), Rerata Lama Sekolah (RLS), Jumlah Anggota Legislatif Perempuan (JALP), serta Indeks Berdaya Gender (IBG). Penelitian menggunakan provinsi Jawa Barat sebagai lokasi, dengan data sekunder berbasis tahun 2017 hingga 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rerata Lama Sekolah (RLS) menjadi satu-satunya variabel dengan pengaruh positif pada Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan pada panggung politik akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya perempuan yang berpendidikan tinggi. Variabel lain tidak memiliki pengaruh kepada indeks tersebut.

Kata kunci: Kontribusi perempuan, Gender, Lembaga legislatif, Politik, Indeks pembangunan gender

How to cite: Abidin, A. Z., Arif, M., & Abroroh, S. A. (2022). Studi keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(1), 23-36. <https://doi.org/10.53088/jerps.v2i1.385>

1. Pendahuluan

Perempuan di era modern telah mulai bangkit menjadi sosok individu yang dinilai mampu dan kompeten dalam menjalankan berbagai pekerjaan pada berbagai bidang. Kontribusi perempuan telah hadir muncul di bidang ekonomi, sosial, pendidikan,

budaya, keamanan, bahkan pada bidang politik. Politik menjadi satu bidang yang menarik untuk di bahas karena selama ini masih dikaitkan dengan sosok laki-laki sebagai seorang pemimpin. Sehingga salah satu ukuran dalam melihat kontribusi perempuan di bidang politik adalah melalui jumlah perempuan yang duduk pada institusi-institusi substansial Negara, salah satunya institusi legislatif. Pemerintah diharapkan mampu memberi celah bagi para perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis secara politik. Hal ini juga telah dicantumkan pada UU. No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Bahwa perempuan wajib diberikan ruang untuk berkarya di institusi legislatif setidaknya dengan presentase 30% dari total yang ada.

Tabel 1. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020 (Persen)

Wilayah Jawa Barat	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen)			
	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	22,00	22,00	20,00	20,83
Bogor	12,00	12,00	9,09	9,09
Sukabumi	12,00	12,00	16,00	12,00
Cianjur	18,00	24,00	18,00	18,00
Bandung	28,00	22,00	12,73	14,81
Garut	16,00	16,00	16,00	20,00
Tasikmalaya	16,00	16,00	16,00	16,00
Ciamis	10,00	10,00	12,00	12,00
Kuningan	26,00	26,00	22,00	22,00
Cirebon	30,00	26,00	30,00	26,00
Majalengka	14,00	16,00	12,00	12,00
Sumedang	18,00	18,00	18,00	18,00
Indramayu	22,00	22,00	34,00	34,69
Subang	16,00	20,00	18,00	18,00
Purwakarta	24,44	24,44	28,89	28,89
Karawang	20,00	20,00	28,00	28,00
Bekasi	12,00	12,00	16,00	18,00
Bandung Barat	6,00	12,00	12,00	12,00
Pangandaran	14,29	17,14	22,50	22,50
Kota Bogor	17,78	11,11	18,00	18,00
Kota Sukabumi	14,29	14,29	17,14	17,65
Kota Bandung	6,00	10,00	16,00	16,33
Kota Cirebon	23,53	22,86	28,57	28,57
Kota Bekasi	16,00	16,00	16,00	16,00
Kota Depok	38,00	38,00	24,00	26,00
Kota Cimahi	31,11	31,11	24,44	26,67
Kota Tasikmalaya	11,11	11,11	6,67	6,67
Kota Banjar	4,00	8,00	3,33	3,45

Sumber: BPS, (2021)

Eksistensi Undang-undang tersebut ternyata mampu menaikkan jumlah partisipasi perempuan dalam legislatif, yang hanya mencapai 11,82% pada Pemilihan Umum tahun 2004 menjadi 17,86% pada Pemilihan Umum tahun 2009 (Kertati, 2019). Keberadaan UU yang menjamin keterlibatan perempuan pada legislatif ternyata belum cukup untuk mendorong nama perempuan di tahun-tahun selanjutnya. Secara rata-

rata, partisipasi perempuan memang terus bertambah namun dengan angka presentase yang cukup berfluktuasi. Salah satu wilayah yang memiliki jumlah kontribusi perempuan di legislatif paling besar di Indonesia, adalah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Tabel 1 keterlibatan perempuan dalam politik di Jawa Barat dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017-2020 mengalami penurunan, hal itu terjadi karena anggota dewan perempuan yang terpilih secara resmi menjadi anggota legislatif Provinsi Jawa Barat berkurang. Dalam hal ini maka masyarakat yang khususnya Jawa Barat mulai melihat bahwa keterwakilan perempuan cukup penting di parlemen. Ini juga menandakan bahwa perempuan mulai diperhitungkan dan kehadirannya dianggap cukup penting dalam mewarnai keputusan-keputusan kebijakan di legislatif. Maka dari itu sebagai masyarakat haruslah ikut dalam berpartisipasi supaya keterwakilan perempuan itu memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat terutama yang terkait dengan permasalahan gender (Ani Martini, Maichel Wutoy, 2021; Prastiwi, 2018; Rahmawati & Hidayah, 2020; Zainuri, 2019).

Perlunya peranan perempuan dalam parlemen sendiri ditengarai karena tingginya kasus-kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak serta isu tentang kesenjangan gender saat ini, hal ini pun menjadi tugas penting yang harus segera diselesaikan. Adanya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan gender saat ini pun dirasa belum optimal oleh masyarakat khususnya bagi perempuan. Faktanya masih banyak kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap kaum perempuan seperti kasus KDRT, diskriminasi, *human trafficking*, kekerasan seksual, dan sebagainya (Kertati, 2021; Kiftiyah, 2019; Prihantoro, 2019).

Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan, JALP Provinsi Jawa Barat perlu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung mengenai kesetaraan gender. Saat ini di Jawa Barat sendiri kebijakan yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan perlindungan bagi perempuan masih dirasa belum maksimal. Di tengah era reformasi dan otonomi daerah saat ini telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif termasuk di antaranya adalah perempuan. Jumlah anggota dewan perempuan akan memberikan dampak pada kinerja di legislatif. Meskipun belum ada standar baku mengenai ukuran kinerja legislatif dalam melaksanakan salah satu peran dan fungsinya, tetapi dengan jumlah anggota dewan perempuan yang menjabat jelas akan berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan (Adnan & Amri, 2021; Kiftiyah, 2019; Prihantoro, 2019).

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan kesempatan perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dan berkontribusi di bidang ekonomi. Meskipun demikian, faktanya tidak mudah bagi perempuan untuk terjun ke dalam kegiatan ekonomi. Budaya dan pola pikir yang telah mengakar di kehidupan masyarakat terkait kedudukan perempuan membuat kaum perempuan harus menghadapi berbagai macam kendala untuk berkarya. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya sehingga memperoleh

manfaat yang sama dari berbagai cara untuk mengatur perekonomian. Hal ini disebabkan kesetaraan gender akan memberikan akses bagi para perempuan untuk berkontribusi dalam pergerakan ekonomi suatu bangsa. Akibatnya, pergerakan ekonomi akan semakin efektif dan perempuan juga lebih dihargai perannya (Abdurrahman & Tusianti, 2021; Kurnianingsih et al., 2022; Nur Aini, 2021).

Kesetaraan gender tidak hanya menjadi masalah wanita tapi menjadi persoalan pembangunan. Pemberdayaan perempuan terutama dalam masalah ekonomi diperlukan untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, diskriminasi pada berbagai aspek kehidupan masih banyak terjadi. Diskriminasi tersebut terjadi baik dalam hal persamaan hak, akses terhadap sumber pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan sebuah proses agar perempuan memiliki daya untuk menjadi “*bread winner*” sehingga mampu menghilangkan ketergantungan ekonomi dan melepaskan dari jerat kemiskinan. Sementara itu, pemberdayaan dalam politik bermakna proses untuk meningkatkan ketertarikan perempuan dalam dunia politik dan berperan serta dalam pengambilan keputusan (Adnan & Amri, 2021; Pertiwi et al., 2021; Prihantoro, 2019).

Dalam rangka peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Strategi pengarusutamaan gender mengikutsertakan dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa diskriminasi gender masih banyak terjadi dalam seluruh aspek kehidupan. Diskriminasi perempuan terjadi dalam persamaan hak, mengakses sumber pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan dan partisipasi politik (Abdurrahman & Tusianti, 2021).

Salah satu indeks yang terkait dengan gender adalah Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Berdaya Gender. Kedua indeks tersebut merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh sebab itu, *Unit Nations Development Programs* (UNDP) memperkenalkan dua indeks untuk mengukur keberhasilan pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Berdaya Gender (IBG) guna merentas ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, serta memberikan pemberdayaan terhadap perempuan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Amaliah & Riniwati, 2021; Kurnianingsih et al., 2022).

Indeks Pembangunan Gender adalah indeks yang menggambarkan pencapaian pembangunan kelayakan hidup seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan dengan memperhitungkan ketimpangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan, Indeks Berdaya Gender adalah indeks yang memfokuskan pada partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik maupun masyarakat. Kedua indeks ini digunakan oleh Indonesia untuk mengukur keberhasilan pembangunan gender dan pemberdayaan gender sehingga tidak terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan (Ayu safitri, 2019; Nur Aini, 2021).

Tabel 2. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020 (Angka Indeks)

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	89,18	89,19	89,26	89,20
Bogor	88,69	89,05	89,39	89,23
Sukabumi	86,90	86,95	87,43	87,37
Cianjur	83,56	83,72	84,36	84,14
Bandung	93,43	93,59	93,96	93,95
Garut	81,96	82,42	82,54	82,29
Tasikmalaya	85,63	85,98	86,05	86,02
Ciamis	85,60	86,00	86,49	86,61
Kuningan	86,34	86,62	86,92	86,81
Cirebon	82,51	82,92	83,50	83,47
Majalengka	85,43	85,93	85,76	85,91
Sumedang	94,60	94,88	95,01	95,18
Indramayu	87,91	87,97	88,35	88,15
Subang	90,52	90,57	90,58	90,53
Purwakarta	87,18	87,19	86,78	86,56
Karawang	90,42	90,45	90,33	90,12
Bekasi	88,00	88,28	88,68	88,58
Bandung Barat	79,11	79,18	79,29	79,06
Pangandaran	89,30	89,68	90,02	89,78
Kota Bogor	90,90	90,92	91,11	91,02
Kota Sukabumi	90,95	91,07	91,44	91,36
Kota Bandung	95,03	95,11	94,82	94,68
Kota Cirebon	93,94	93,94	94,35	94,39
Kota Bekasi	93,09	93,26	93,02	92,95
Kota Depok	93,05	93,06	92,78	93,01
Kota Cimahi	92,33	92,36	92,20	92,01
Kota Tasikmalaya	91,06	91,07	91,48	91,64
Kota Banjar	86,93	87,11	87,12	87,17

Sumber: BPS Jawa Barat, (2021)

Berdasarkan Tabel 2 Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2019 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian khusus merentas ketimpangan gender agar dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap kesetaraan gender. Adanya keselarasan antara laki-laki dan perempuan secara bersama-sama sangat mendukung peningkatan kesetaraan gender baik dari sisi pendidikan, tenaga kerja dan juga ekonomi (Kertati, 2021).

Berdasarkan Tabel 3 bahwa Indeks Berdaya Gender di Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan yang cukup besar dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender, masyarakat perlu berpartisipasi langsung dan mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan membangun kesetaraan dan

keadilan gender sehingga program pemerintah tersebut dapat diimplementasikan dengan baik (Kertati, 2021; Rahmawati & Hidayah, 2020).

Tabel 3. Indeks Berdaya Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2020 (Angka Indeks)

Wilayah Jawa Barat	Indeks Berdaya Gender (IBG)			
	2017	2018	2019	2020
Provinsi Jawa Barat	70,04	70,20	69,48	70,24
Bogor	57,10	56,64	55,73	55,76
Sukabumi	58,33	53,07	60,70	55,86
Cianjur	55,95	60,36	60,32	58,59
Bandung	76,50	72,40	65,86	67,07
Garut	65,63	64,67	68,23	71,91
Tasikmalaya	63,04	63,15	64,30	64,13
Ciamis	63,67	64,54	65,35	66,43
Kuningan	72,39	73,05	70,58	70,54
Cirebon	74,27	72,39	75,61	72,07
Majalengka	59,15	61,67	58,90	60,06
Sumedang	68,08	70,57	70,94	70,78
Indramayu	58,94	61,12	70,10	70,45
Subang	65,90	68,81	68,83	68,75
Purwakarta	72,25	72,04	74,39	73,94
Karawang	68,08	68,52	74,80	74,42
Bekasi	57,16	57,02	60,83	62,46
Bandung Barat	53,98	62,71	64,53	65,40
Pangandaran	65,45	69,20	74,56	74,57
Kota Bogor	67,37	62,04	68,91	69,03
Kota Sukabumi	60,20	59,55	66,82	66,93
Kota Bandung	58,84	63,63	70,38	70,49
Kota Cirebon	74,23	73,97	77,86	78,09
Kota Bekasi	65,68	65,96	66,10	65,75
Kota Depok	81,40	81,49	74,82	76,31
Kota Cimahi	76,97	77,21	74,14	75,13
Kota Tasikmalaya	63,50	62,92	59,32	59,51
Kota Banjar	47,96	53,80	49,53	50,56

Sumber: BPS Jawa Barat (2021)

2. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laman Badan Pusat Statistik tahun 2021. Jenis data meliputi data Indeks Pembangunan Gender (IPG), Jumlah Anggota Legislatif Perempuan (JALP), Jumlah Penduduk Perempuan (JPP), Rerata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Berdaya Gender (IBG) di Provinsi Jawa Barat. Data menggunakan data time series pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Metode analisis data menggunakan regresi panel data, dengan uji pemilihan model menggunakan uji Chow, Hausmann, uji F, uji t , dan uji R^2 . Adapun permodelan kuantitatif yang digunakan adalah model ekonometrika di bawah ini:

$$IPG_{it} = \beta_0 + \beta_1 DPRD_{it} + \beta_2 \log JPP_{it} + \beta_3 RLS_{it} + \beta_4 IDG_{it} + s_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

IPG = Indeks Pembangunan Gender (Angka Indeks)

JALP = Jumlah Anggota Legislatif Perempuan (%)

JPP = Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)

RLS = Rerata Lama Sekolah (Tahun)

IBG = Indeks Berdaya Gender (Angka Indeks)

s = Residual

β_0 = Slope

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien

Log = Operator logaritma berbasis *e* *i* = Observasi ke *i*

t = Tahun ke *t*

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil penelitian

Metode pada penelitian ini yang digunakan adalah regresi data panel. Metode regresi data panel terdapat tiga model yang bisa digunakan untuk menganalisis hasil estimasi. Ketiga metode tersebut adalah *Pooled Least Squares (PLS)* atau *Common Effects Model (CEM)*, *Fixed Effects Model (FEM)* dan *Random Effects Model (REM)*. Untuk menentukan model mana yang paling cocok digunakan dari ketiganya, maka dapat dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman. Hasil regresi pada model data panel sebelumnya, tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien Regresi dan Probabilitas					
	CEM	Prob.	FEM	Prob.	REM	Prob.
C	69,8256	0,0000	69,30955	0,0000	87,1134	0,0000
JALP	-0,01044	0,8970	-0,01502	0,8555	-0,02061	0,1962
LogJPP	-0,04324	0,9154	-0,03250	0,9372	-0,54010	0,4245
RLS	1,54788	0,0000	1,54893	0,0000	0,94661	0,0000
IBG	0,11290	0,1920	0,11965	0,1798	0,02760	0,1425
R ²	0,42245		0,42418		0,30867	
Adj. R ²	0,40002		0,38387		0,28182	
F-Statistik	18,83513		10,5236		11,4969	
Prob F-Statistik	0,00000		0,00000		0,00000	

Sumber: BPS, diolah

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji chow digunakan menentukan model yang paling baik antara *Common* atau *Pooled* dan *Fixed Effects* yang digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji chow memiliki hipotesis dalam penggunaannya yaitu:

H_0 : model mengikuti *Common* atau *Pooled*

H_A : model mengikuti *Fixed Effects*

Penentuan model yang baik mengikuti *Chi-Square* atau F-test dengan melihat apakah probabilitasnya (*p-value*) lebih besar atau lebih kecil dari alpha (α). Jika *p-value* > α (0,05), maka H_0 tidak ditolak sehingga model mengikuti *Common* atau

Pooled. Apabila nilai $p\text{-value} < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effects*.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	793,539593	26,77	0,0000

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar $0,0000 < \alpha$ sebesar 0,05 atau 5%, hal ini berarti menunjukkan bahwa $p\text{-value}$ lebih kecil dari α (0,05), sehingga H_0 ditolak maka model mengikuti *Fixed Effects Model* (FEM).

Uji Hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah model *Fixed Effects* atau *Random Effects* yang paling tepat digunakan. Adapun hipotesis dari pengujian uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : model mengikuti *Random Effects*

H_A : model mengikuti *Fixed Effects*

Penentuan model yang baik mengikuti *Chi-Square* statistik atau *Cross Section Random* dengan melihat apakah probabilitasnya ($p\text{-value}$) lebih besar atau lebih kecil dari α (0,05 atau 5%). Jika $p\text{-value} > \alpha$ (0,05), maka H_0 tidak ditolak sehingga model mengikuti *Random Effects*. Apabila nilai $p\text{-value} < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effects*.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
<i>Cross-section random</i>	4,200592	4	0,3795

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Tabel 6, hasil pengujian uji hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section random* sebesar $0,3795 > \alpha$ sebesar 0,05 atau 5%, hal ini berarti menunjukkan bahwa $p\text{-value}$ lebih besar dari α (0,05), sehingga H_0 tidak ditolak maka model mengikuti *Random Effects Model* (REM).

Pada pengujian yang dilakukan sebelumnya yaitu dengan uji chow dan uji hausman yang digunakan untuk memilih model yang paling baik untuk analisis regresi data panel, di mana pengujian menunjukkan bahwa dari *Random Effects Model* merupakan model yang paling tepat digunakan untuk menganalisis regresi data panel.

Tabel 7. Hasil Estimasi *Random Effects Model*

$IPG_{it} = 87,11341 - 0,020613DPRD_{it} - 0,540095LogJPP_{it}$			
	(0,1962)	(0,4245)	
$+0,946611RLS_{it} + 0,027601IDG_{it}$			
	(0,0000)**	(0,1425)	
$R^2 = 0,3087$; $DW\text{-Stat.} = 1,5231$; $F\text{-Stat.} = 11,4969$;			
$Prob. F\text{-Stat.} = 0,0000$			

Sumber: BPS, diolah; Keterangan: *signifikan pada $\alpha = 0,01$; **signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***signifikan pada $\alpha = 0,10$. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik ($p\text{-value}$) t-statistik.

Dari Tabel 7 terlihat bahwa nilai p (p value), probabilitas, atau signifikan empirik statistik F bernilai 0,0000 ($< 0,05$); jadi H_0 ditolak. Kesimpulannya, model terestimasi *Random Effects Model* (REM).

Tabel 8. Effects dan Konstanta Random Effects Model (REM)

Kabupaten/Kota	Effects	Konstanta
Kabupaten Bogor	1,534	88,647
Kabupaten Sukabumi	0,033	87,147
Kabupaten Cianjur	-3,057	84,056
Kabupaten Bandung	4,904	92,017
Kabupaten Garut	-5,435	81,678
Kabupaten Tasikmalaya	-1,810	85,303
Kabupaten Ciamis	-2,306	84,807
Kabupaten Kuningan	-1,507	85,606
Kabupaten Cirebon	-4,011	83,102
Kabupaten Majalengka	-1,701	85,413
Kabupaten Sumedang	5,838	92,951
Kabupaten Indramayu	2,131	89,244
Kabupaten Subang	3,262	90,376
Kabupaten Purwakarta	-1,755	85,358
Kabupaten Karawang	2,782	89,895
Kabupaten Bekasi	-0,374	86,740
Kabupaten Bandung Barat	-9,377	77,736
Kabupaten Pangandaran	0,688	87,801
Kota Bogor	0,085	87,198
Kota Sukabumi	0,567	87,680
Kota Bandung	3,997	91,110
Kota Cirebon	3,154	90,267
Kota Bekasi	1,801	88,914
Kota Depok	1,843	88,956
Kota Cimahi	0,305	87,419
Kota Tasikmalaya	1,256	88,370
Kota Banjar	-2,845	84,269

Sumber: BPS, diolah

Nilai konstanta di Provinsi Jawa barat dapat dilihat pada Tabel 8, terlihat bahwa wilayah dengan nilai konstanta tertinggi adalah Kabupaten Sumedang yaitu 92,951445 dan nilai konstanta terendah adalah Kabupaten Bandung Barat yaitu 77,736077. Kemudian terkait dengan Jumlah Anggota Legislatif Perempuan, Jumlah Penduduk Perempuan, Rerata Lama Sekolah dan Indeks Berdaya Gender terhadap Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sumedang berarti Pengarusutamaan Gender (PUG) semakin baik dengan diikutinya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka ketimpangan gender di wilayah tersebut akan semakin kecil.

Kemudian di Kabupaten Bandung Barat jika tidak diikuti dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan maka Pengarusutamaan Gender (PUG) semakin buruk, hal itu dikarenakan ketimpangan gender di wilayah tersebut akan semakin besar dan juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam gender.

Uji F (Uji Eksistensi Model)

Model terestimasi eksis apabila seluruh variabel independennya secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi model terestimasi tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model terestimasi memakai uji F. dalam penelitian ini, karena variabel independen model terestimasi ada empat, maka formulasinya $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, koefisien regresi secara simultan bernilai nol atau model terestimasi tidak eksis; $H_A: \beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0 \vee \beta_4 \neq 0$, koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol atau model terestimasi eksis. H_0 tidak ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, atau F -statistik $> \alpha$; dan H_0 ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, atau F -statistik $< \alpha$.

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F pada model terestimasi memiliki nilai 0,0000 ($< 0,05$); jadi H_0 ditolak. Kesimpulan model terestimasi eksis artinya, Jumlah Anggota Legislatif Perempuan, jumlah penduduk perempuan, Rerata Lama Sekolah dan Indeks Berdaya Gender secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender.

Uji t (Uji Validitas Pengaruh)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara individu berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. H_0 uji t adalah $\beta_i = 0$ ($i = 1-4$) yaitu Jumlah Anggota Legislatif Perempuan, jumlah penduduk perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan dan Indeks Berdaya Gender tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender. Sementara H_A uji t adalah $\beta_i > 0$ ($i = 1-4$) yaitu Jumlah Anggota Legislatif Perempuan, jumlah penduduk perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan dan Indeks Berdaya Gender berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan gender. H_0 akan ditolak jika nilai probabilitas t -statistik $< \alpha$, sedangkan H_0 tidak ditolak jika nilai probabilitas t -statistik $> \alpha$.

Berdasarkan pada Tabel 9 terlihat bahwa probabilitas t -statistik Jumlah Anggota Legislatif Perempuan dan jumlah penduduk perempuan adalah 0,1962 ($> 0,10$) dan 0,4245 ($> 0,10$), maka Jumlah Anggota Legislatif Perempuan dan jumlah penduduk perempuan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender. Kemudian Rerata Lama Sekolah memiliki probabilitas t -statistik sebesar 0,0000 ($< 0,05$) sehingga berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan gender. Sedangkan Indeks Berdaya Gender probabilitas t -statistik 0,1425 ($> 0,10$), maka Indeks Berdaya Gender tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender. Penarikan kesimpulan tersebut didasarkan pada probabilitas t -statistik.

Tabel 9. Hasil Uji t

Variabel	Probabilitas	Kriteria	Kesimpulan
JALP	0,1962	$> 0,10$	Tidak Berpengaruh
Log (JPP)	0,4245	$> 0,10$	Tidak Berpengaruh
RLS	0,0000	$< 0,05$	Berpengaruh $\alpha = 0,05$
IBG	0,1425	$> 0,10$	Tidak Berpengaruh

Sumber: BPS, diolah

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,3087, yang artinya 30,87% variasi variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Anggota Legislatif Perempuan (JALP), Jumlah Penduduk Perempuan (JPP), Rerata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Berdaya Gender (IBG). Sisanya 69,13% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berdasarkan hasil yang terpilih pada Tabel 7 terlihat bahwa variabel independen yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Rerata Lama Sekolah (RLS). Sementara Jumlah Anggota Legislatif Perempuan (JALP), Jumlah Penduduk Perempuan (JPP), dan Indeks Berdaya Gender (IBG) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Variabel Rerata Lama Sekolah (RLS) memiliki koefisien regresi sebesar 0,946611 dengan pola hubungan linier-linier. Artinya, apabila Rerata Lama Sekolah naik selama 1 tahun, maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) akan mengalami kenaikan sebesar 0,946611 dalam angka indeks. Sebaliknya, jika Rerata Lama Sekolah (RLS) turun selama 1 tahun, maka Indeks Pembangunan Gender (IPG) akan mengalami penurunan sebesar 0,946611 dalam angka indeks.

3.2. Pembahasan

Analisis Pengaruh antar Variabel

Indeks Pembangunan Gender, selama periode 2017-2020, ternyata dipengaruhi oleh Rerata Lama Sekolah. Sementara Jumlah Anggota Legislatif Perempuan, Jumlah Penduduk Perempuan dan Indeks Berdaya Gender tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Hal ini dikarenakan bahwa keterwakilan pada bidang legislatif mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang masih melekat dengan begitu masih belum optimalnya representasi perempuan di bidang politik masih menjadi kendala dan penyebabnya (Ani Martini, Maichel Wutoy, 2021; Hevriansyah, 2021; Purwanti, 2015; Zainuri, 2019). Maka dari itu, partisipasi perempuan dalam politik ini perlu ditingkatkan kembali dengan adanya dukungan masyarakat maupun pemerintah supaya tingkat pemberdayaan perempuan dalam bidang legislatif dapat mengikis ketimpangan gender dalam politik di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2020.

Pengaruh Jumlah Penduduk Perempuan pada Indeks Pembangunan Gender

Jumlah Penduduk Perempuan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Jika jumlah penduduk yang berkurang maka dapat menjadi beban pembangunan daerah, hal ini disebabkan kuantitas penduduk yang rendah jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk, kemudian hal inilah yang dapat mengurangi kualitas dan produktivitas penduduk serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Dengan begitu, jumlah keseluruhan penduduk perempuan di Provinsi Jawa Barat pada tahun

2017-2020 jika tidak dibangun melalui pendidikan, kemiskinan serta kesehatan maka dapat menyebabkan ketimpangan dalam gender (Handayani et al., 2016; Prastiwi, 2018).

Pengaruh Rerata Lama Sekolah pada Indeks Pembangunan Gender

Rerata Lama Sekolah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender, hal ini memperlihatkan bahwa jika Rerata Lama Sekolah mengalami kenaikan maka Indeks Pembangunan Gender akan naik. Secara teoritis mekanisme ini terjadi karena jika Rerata Lama Sekolah naik maka ketimpangan gender dalam bidang pendidikan menjadi menurun. Dalam hal ini jika tingkat pendidikan perempuan semakin tinggi maka dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian. Jika semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka waktu yang digunakan semakin mahal, karena setinggi-tingginya pendidikan perempuan tidak harus di dalam rumah tangga tapi bisa berurusan diluar rumah tangga juga. Kesadaran masyarakat begitu penting terhadap pendidikan perempuan, dengan meningkatkan kualitas pendidikan perempuan (Kiftiyah, 2019; Prihantoro, 2019).

Pengaruh Indeks Berdaya Gender pada Indeks Pembangunan Gender

Indeks Berdaya Gender tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu dijelaskan bahwa keterwakilan perempuan mengalami penurunan, sehingga dapat menyebabkan IBG juga menurun. Hal tersebut disebabkan karena faktor budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Indeks Berdaya Gender (IBG) jika mengalami kenaikan maka pemberdayaan gender terhadap perempuan dapat memberikan peluang yang tinggi baik dalam segi politik maupun ekonomi. Keterlibatan perempuan di parlemen dapat berkontribusi penuh dalam perekonomian dan juga memberikan pengaruh secara tidak langsung pada pendapatan Negara melalui berpartisipasi pada bidang politik (Hevriansyah, 2021; Purwanti, 2015; Zainuri, 2019).

4. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, antara lain bahwa hasil uji pemilihan model estimator yang terbaik membuktikan bahwa *Random Effects Model* (REM) merupakan model terpilih. Berdasarkan uji eksistensi model pendekatan *Random Effects Model* (REM) terbukti bahwa model terestimasi eksis, dengan begitu variabel Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Anggota Legislatif Perempuan (JALP), Jumlah Penduduk Perempuan (JPP), Rerata Lama Sekolah (RLS) dan Indeks Berdaya Gender (IBG). Kemudian sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berdasarkan uji validitas pengaruh dapat diketahui bahwa secara parsial variabel Rerata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender. Sementara variabel Jumlah Anggota Legislatif Perempuan (JALP), Jumlah Penduduk

Perempuan (JPP), dan Indeks Berdaya Gender (IBG) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG). Rerata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Ucapan Terimakasih

Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Muhammad Arif selaku mitra dalam penulisan artikel ini, ucapan terima kasih juga saya sematkan bagi pengelola JERPS semoga sukses, terus berkembang dan berjaya selalu.

Referensi

- Abdurrahman, A., & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 204–219. <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1319>
- Adnan, G., & Amri, K. (2021). Pemberdayaan Gender, Pendapatan Perempuan Dan Penurunan Kemiskinan: Bukti Data Panel Dari Kawasan Barat Indonesia. *Media Ekonomi*, 28(1), 37–56. <https://doi.org/10.25105/me.v28i1.6265>
- Amaliah, K. N., & Riniwati, H. (2021). Pemodelan Dinamika Sistem Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Pembangunan Gender Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sumenep. *Prosiding SNasPPM*, 6(1), 145–150. <https://snasppm.unirow.ac.id/prosiding/index.php/SNasPPM/article/view/645>
- Ayu, Safitri L. D. (2019). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Pembangunan Gender Di Indonesia Dengan Pendekatan Regresi Probit Biner Bivariat. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 16(2), 150. <https://doi.org/10.20956/jmsk.v16i2.7436>
- Handayani, N. S., Bendesa, I. K. ., & Yuliani, N. N. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-rata lama sekolah dan PDRB Per Kapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449–3474.
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85. <http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41>
- Kertati, I. (2019). Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 62–72. <https://doi.org/10.31334/trans.v2i1.423>
- Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta. *Public Service and Governance Journal*, Vol 2(1), 1–11.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang Dalam Masa Pandemi Covid-

19. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 45–55.
- Martini, Ani, Maichel Wutoy, P. D. W. (2021). Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 14–22.
- Nur Aini, A. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 77–91. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.147>
- Pertiwi, U. E., Heriberta, H., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(2), 69–76. <https://doi.org/10.53867/jea.v1i2.17>
- Prastiwi, J. H. (2018). Menakar Kontribusi Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Keterwakilan Perempuan. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.15783>
- Prihantoro, E. (2019). Stereotip Perempuan Calon Legislatif Dalam Wacana Media Massa Online Di Tahun Politik. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 12(1), 16–24. <https://journal.ubm.ac.id/index.php/semiotika/article/view/1540>
- Purwanti, A. (2015). Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur. In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 44, Issue 2, p. 190). <https://doi.org/10.14710/mmh.44.2.2015.190-199>
- Rahmawati, F., & Hidayah, Z. M. (2020). Menelusur Relasi Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 110. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13919>
- Zainuri, M. (2019). Partisipasi Politik Perempuan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2(2), 9–24.